

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Ekspedisi Pamalayu

Istilah Pamalayu harus ditafsirkan bahwa pengiriman tentara Singasari ke Suwarnabhumi pada tahun 1275 dimaksudkan untuk menundukkan negara Malayu yang juga disebut Suwarnabhumi (Slamet Muljana, 1981: 233). Ekspedisi militer ke Suwarnabhumi ialah akibat adanya penerapan politik perluasan wilayah Kerajaan Singhasari di bawah kepemimpinan Sri Kertanagara. Sri Kertanagara adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Pulau Jawa. Gagasan tersebut dimulai tahun 1275 dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Kebo Anabrang untuk menaklukkan *bhumi Malayu melalui Ekspedisi Pamalyu*.

Dalam sastra sejarah Jawa Kuna ekspedisi ke Malayu itu biasa disebut *Pamalayu* artinya: perang melawan Malayu (Slamet Muljana, 1979: 104). Ekspedisi Malayu ini berhasil dengan baik, tentara Singhasari berhasil menundukkan raja Malayu Tribuwanaraja Mauliwarmadewa di Dharmasraya yang berpusat di Jambi dan menguasai Selat Malaka.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa yang dimaksud dengan ekspedisi Pamalayu adalah sebuah diplomasi melalui operasi kewibawaan militer yang dilakukan

Kerajaan Singhasari di bawah perintah Sri Kertanagara pada tahun 1275-1292 terhadap Kerajaan Malayu di Dharmasraya di Pulau Sumatra.

2. Konsep Perluasan Wilayah Kekuasaan

Perluasan merupakan suatu usaha memperluas daerah kekuasaan. Hal ini didasarkan pendapat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengartikan perluasan yaitu :

1. Perihal meluaskan atau memperluas, kota; daerah kekuasaan
2. Penambahan; aktiva tetap kepada yang sudah dimiliki oleh perusahaan
(Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 685).

Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok.

Dikuatkan oleh pendapat Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi yang dikutip oleh Abdulsyani menyatakan bahwa kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak yang menerima pengaruh ini dengan rela atau terpaksa (Abdulsyani, 1994: 136). Sedangkan menurut pendapat J.R.P. French dan B. Raven yang dikutip oleh Abdulsyani. Bahwa Kekuasaan merupakan kemampuan potensial dari seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada (Abdulsyani, 1994: 136).

Selanjutnya menurut Departemen Pendidikan Nasional, Kekuasaan adalah:

1. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dsb); dia telah menggunakannya secara sewenang-wenang.
2. Daerah (tempat dsb) yang dikuasai: bekas Raja itu tidak mau pergi dari bekasnya meskipun sudah kalah perang.
3. Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 604).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa yang dimaksud dengan perluasan wilayah kekuasaan adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam memperluas daerah kekuasaannya dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok lain untuk melancarkan pengaruh dan pihak yang menerima pengaruh ini dengan rela atau terpaksa.

3. Konsep Wawasan Dwipantara

Kata “wawasan” itu sendiri berasal dari *wawas* (bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Adanya penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang (S. Sumarsono, 2001: 55).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “wawasan” berarti hasil mewawas, tinjauan, pandangan, konsepsi cara pandang (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 1271).

Kini kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah abad lebih awal oleh

Kertanagara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep *Cakrawala Mandala Dwipantara* yang dicetuskan oleh Sri Kertanagara sebagai raja Singhasari.

Dwipantara adalah kata dalam bahasa Sansekerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" adalah sinonim "nusa" yang bermakna "pulau" (<http://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara//> diakses tanggal 08-01-2013). Dalam Kamus Jawa Kuna Indonesia kata Dwipantara berarti pulau lain (L. Mardiwarsito, 1986: 55). Kata Nusantara atau Dwipantara berarti pulau-pulau yang berada di antara benua-benua. Dalam kitab *Nagarakretagama* disebutkan kalau Nusantara adalah pulau-pulau kecil yang berada di luar Pulau Jawa. Sedangkan dalam sejarah Malayu, dipakai nama Nusa Tamara. Nama inipun sesungguhnya berasal dari perkataan yang diucapkan "Nusantara".

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa yang dimaksud dengan wawasan Dwipantara adalah cara pandang atau gagasan yang dimiliki seseorang dalam usaha perluasan wilayah kekuasaannya ke Pulau-pulau yang berada di antara Benua-benua khususnya di luar pulau Jawa.

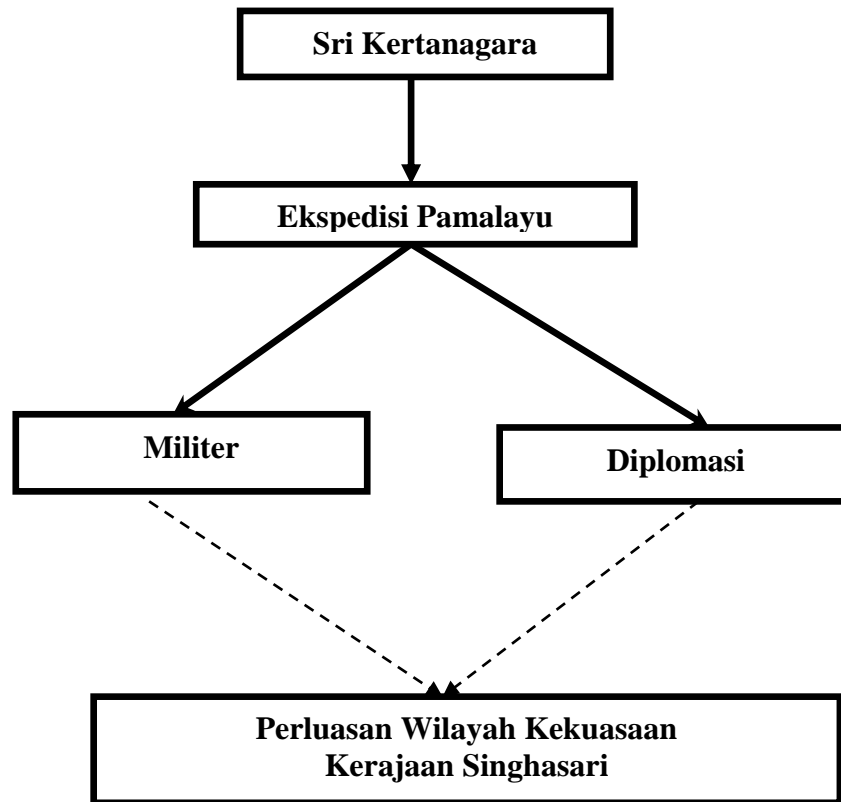
B. Kerangka Pikir

Sri Kertanagara merupakan raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singhasari (1268-1292). Sri Kertanagara adalah seorang raja yang sangat terkenal, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan *Cakrawala Mandala* ke luar pulau Jawa, yang meliputi daerah seluruh *Dwipantara*.

Sri Kertanagara memiliki wawasan suatu persatuan Kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Dengan adanya alasan itulah Sri Kertanagara meluncurkan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan Kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Pada awalnya ekspedisi ini dianggap penaklukan militer, akan tetapi belakangan ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomasi berupa unjuk kekuatan dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kerajaan Malayu Dharmasraya.

Pada tahun 1284 Sri Kertanagara dapat menaklukkan Kerajaan Bali, rajanya ditawan dan dibawa ke Kerajaan Singhasari. Demikianlah maka seluruh daerah-daerah lain tunduk di bawah kekuasaan Sri Kertanagara, yaitu seluruh Pahang, seluruh Malayu, seluruh Gurun, seluruh Bakulapura, tidak perlu disebutkan lagi Sunda dan Madura, karena seluruh Pulau Jawa tunduk di bawah kekuasaan Sri Kertanagara.

C. Paradigma



—————> Garis Kegiatan

- - - - -> Garis Tujuan

REFERENSI

Slamet Muljana. 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu. Tebal Halaman 233.

Slamet Muljana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Halaman 104.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka: Jakarta. Halaman 685.

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi: Skematik, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 136

Ibid.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Op. Cit.* Halaman 604.

S. Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 55.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Op. Cit.* Halaman 1271.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara//> diakses tanggal 08-01-2013, pukul 13. 00 WIB.

L. Mardiwarsito. 1986. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Flores: Nusa Indah. Halaman 55.